

DOWNLOAD DINAMIKA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA NEGARA MUSLIM

HAM & SYARIAT

Menarik dan menantang. Membahas seputar wacana yang bersinggungan dengan Syariat (hukum Islam) dengan Hak Asasi Manusia, merupakan pokok diskusi yang tak pernah ada habisnya, selalu berkembang. Dialog antara Hukum Tuhan dengan Hukum Manusia pun menjadi isu yang sensitif, bahkan seringkali menimbulkan perdebatan, karena kekhawatiran akan produk pemikiran Barat yang dinilai membahayakan eksistensi hukum Islam itu sendiri. Tetapi, apakah sekontras itu? Sebuah pertanyaan sederhana muncul: “Apakah ada keterkaitan satu sama lain antara Syariat dengan HAM?” Tentu pertanyaan kritis ini tak sembarangan dijawab, perlu sumber-sumber serta kajian ilmiah dalam menopangnya secara hati-hati. Pemikiran para peneliti dan reformis Islam kontemporer yang terdapat pada buku ini merupakan gelombang baru dalam menanggapi iklim intelektual dan era politik baru yang muncul pada paruh kedua abad ke-20. Mereka membedah berbagai sistem politik dan perkembangan di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk isu ekonomi, hukum, ilmu kedokteran, imigrasi kaum Muslim ke negara-negara Barat, HAM Internasional, bahkan kesetaraan gender. Berbagai aktor reformis menunjukkan spektrum sikap yang demikian luas tentang reformasi, mulai dari yang hanya terbatas pada usulan norma baru menyesuaikan dengan keadaan baru, hingga keinginan untuk mereformasi penggunaan konsep serta metode secara serempak. [Mizan, Bentang Pustaka, Agama, Islam, Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia]

Islam & Dinamika Sosial Politik Di Indonesia

Islam diturunkan membawa misi sebagai rahmat bagi umat manusia (rahmah li al-âlamîn). Agama ini mengajarkan nilai-nilai yang bersifat universal, terutama akidah dan nilai-nilai dasar akhlak (etika-moral). Memang, sebagian ajaran Islam dalam bidang hukum (syariah) bersifat partikular. Namun, para ulama telah menetapkan filosofi dan etika hukum dalam bentuk maqâshid al-syarî'ah (tujuan syariah). Pengungkapan misi Islam, nilai-nilai dasar akhlak, dan maqâshid al-syarî'ah tersebut sangat penting, terutama dalam konteks akomodasi terhadap budaya lokal dan sistem nasional, serta respons terhadap peradaban modern atau ide-ide global yang sebenarnya diakomodasi hampir semua negara di dunia, seperti hak-hak asasi manusia, demokrasi, dan pluralisme. Dalam konteks Indonesia yang berideologi Pancasila dan dalam waktu bersamaan terjadi proses modernisasi, demokratisasi, sekularisasi, dan desekularisasi, Islam bisa melakukan peran integratif dan sekaligus korektif terhadap negara untuk memperkuat sistem demokrasi yang tetap menjunjung tinggi agama dan kemanusiaan. Buku ini pantas dimiliki siapa saja, baik mahasiswa, akademisi, politisi, pejabat maupun tokoh masyarakat, karena memberikan banyak informasi tentang wawasan kebangsaan dan keagamaan dalam konteks pembangunan sistem demokrasi yang beradab, yang ditandai dengan terwujudnya pemerintahan yang adil, bersih dan akuntabel, serta masyarakat yang religius, jujur, damai, toleran dan menghargai kemajemukan.

Intelektualisme Profetik

Setelah memasuki era reformasi dan pasca reformasi, keadaan berbagai sendi kehidupan berbangsa yang dinamis, cenderung mengarah pada suatu ‘proses’ disorientasi nilai-nilai sosial-budaya yang memprihatinkan. Buku ini merupakan respons akademik penulisnya terhadap kondisi realitas sosial berbangsa yang secara sosiologis kerap dengan ‘potensi’ konflik sosial dan unpredictable, yang bisa saja

dapat ‘mengancam’ disintegrasi sosial dan disintegrasi bangsa. Respons ini ditampilkan dalam analisis yang didukung dengan data sosiologis (agama dan pendidikan) tanpa terputus dan bertautan dalam ‘lintas tiga zaman’: Orde Baru, Reformasi, dan Pascareformasi. Catatan pentingnya adalah bahwa pendidikan, sebagai salah satu ‘basis’ fundamental kehidupan berbangsa, dalam kurun waktu itu, ternyata belum mampu memproduksi sumber daya manusia (human-resources), yang dapat berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di Asia. Kehadiran buku ini merupakan kontribusi positif penulisnya dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial (social-sciences), agama (religious), dan pendidikan (education)—dalam perubahan sosial. Buku ini patut dan layak dibaca berbagai kalangan: akademisi, mahasiswa (S1, S2, S3), praktisi pendidikan, dan pembaca budiman lainnya.

DINAMIKA SOSIOLOGIS INDONESIA : Agama dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial

Masalah warisan merupakan permasalahan yang sangat rumit. Bagi sebagian kalangan, persoalan ini bahkan dapat menimbulkan peperangan, perpecahan hingga saling fitnah dalam keluarga. Untuk dapat mencegah permasalahan mengenai harta warisan tersebut, maka peranan hukum diperlukan untuk memberikan kepastian dalam pembagian harta warisan kepada anak, istri/suami maupun ahli waris yang berhak. Pikiran yang mendorong penyusunan buku ini berasal dari pertanyaan bagaimana secara mudah dan benar dalam mempelajari hukum keluarga, khususnya mengenai hukum waris. Mengingat di Indonesia hingga saat ini masih terdapat pluralisme hukum di bidang waris, yakni hukum waris Islam, adat, dan hukum waris Barat termuat dalam Burgerlijk Wetboek Indonesia. Buku yang ada di tangan pembaca ini, semula merupakan bahan kuliah untuk program S-1 Ilmu Hukum, S-2 Magister Kenotariatan, dan S-2 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Buku ini dipublikasikan secara lebih luas setelah mengalami beberapa penyempurnaan dari edisi yang sebelumnya telah ada. Buku ini dapat dibaca untuk seluruh kalangan, baik bagi mahasiswa, akademisi, praktisi maupun masyarakat umum untuk menerapkan ketentuan waris serta menyelesaikan permasalahan waris di masyarakat. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer

Kebudayaan dan peradaban Islam di era globalisasi ini dihadapkan pada sejumlah masalah yang kompleks dan pelik, terutama terkait dengan isu-isu aktual seputar modernisasi, westernisasi, sekularisasi, moralitas sekuler, dan budaya teenage tyranny. Di satu sisi, umat Islam memandang budaya Barat sebagai bentuk kebudayaan unggul yang perlu diteladani sebagai medium untuk mengatasi kejumudan dan keterbelakangan umat Islam di bidang sains dan teknologi. Namun, di sisi lain, budaya Barat yang sedang mengalami krisis spiritual dapat menjadi mesin penghancur bagi nilai-nilai adiluhung Islam itu sendiri. Bahkan, sebaliknya, sejumlah ilmuwan Barat justru memandang Islam sebagai oase yang diharapkan mampu mengatasi kekeringan spiritual yang sedang mereka alami. Maka, pada momen inilah dibutuhkan suatu dialog peradaban antara Barat dan Islam, alih-alih clash civilization. Paradigma konflik dalam kesejarahan dua peradaban ini sudah semestinya dikubur, mengingat masalah yang dihadapi oleh yang satu hampir tidak dapat diatasi tanpa “uluran tangan” yang lainnya. Namun, mengapa harus Islam, dan bukan agama lain, yang dianggap mampu menjadi problem solver terhadap masalah yang melilit peradaban Barat? Buku ini menyediakan alasannya. Buku karya Prof. Dr. H. Faisal Ismail, M.A. ini merindukan suatu momen romantik antara Islam dan Barat untuk sebuah dunia dan kehidupan yang menawan bagi generasi umat manusia masa depan.

Islam Dinamika Dialogis Keilmuan, Kebudayaan, dan Kemanusiaan

Dari waktu ke waktu, Hukum Tata Negara berkembang dengan pesat Perkembangan kehidupan ketatanegaraan dewasa ini mulai meng- geser praktik Hukum Tata Negara dari arah orientasi terlalu politis ke arah orientasi yang lebih praktis Perkembangan ini menunjukkan bahwa Hukum Tata Negara menempati posisi penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia saat ini Seiring dengan bangkitnya kesadaran

konstitusional di kalangan warga negara Indonesia, antara lain sebagaimana tercermin dari banyaknya permohonan perkara di MK RI, kemudian muncul kebutuhan akan Hukum Tata Negara yang berorientasi lebih teknis-yuridis Bidang Hukum Tata Negara yang sebelum Era Reformasi relatif kurang populer baik di kalangan mahasiswa hukum, mahasiswa pada umumnya, maupun masyarakat luas, kini mulai disadari sebagai bidang hukum yang penting diketahui oleh berbagai kalangan. Ini kemudian menciptakan kebutuhan pengetahuan Hukum Tata Negara di kalangan masyarakat umum. Atas dasar itulah buku ini dihadirkan. Buku Hukum Tata Negara ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terutama bagi kalangan pelajar, dan praktisi hukum yang ingin mendalami Hukum Tata Negara secara lebih lanjut.

Hukum Tata Negara-Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia

Rumahku, surgaku, begitulah sabda Nabi Muhammad saw. dalam sebuah hadis. Membangun surga di bumi berarti membangun keluarga yang kukuh, harmonis, tenteram lahir-batin (sakinah), dan penuh dengan cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Keluarga bisa menjadi surga di bumi. Tapi tak jarang dapat menjadi neraka bagi individu-individu di dalamnya. Baik-buruk seseorang banyak dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Keluarga adalah sekolah pertama kita mengeja kata, mengenal hidup, dan belajar tentang moral, tentang kemanusiaan kita. Keluarga yang tak harmonis, tak menghargai kesetaraan serta persamaan hak, dan penuh konflik bukan hanya merusak tatanan rumah tangga, tapi juga akan berpengaruh pada kehidupan sosial suami (ayah), istri (ibu) maupun anak-anaknya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga, kita akan merasakan sendiri dampaknya baik langsung maupun tidak langsung. Buku ini berisi jawaban terhadap berbagai problematika hukum Islam terkait dengan pernikahan dan keluarga. Uraian dimulai dengan dasar ajaran Islam mengenai perkawinan dan kehidupan keluarga. Kemudian dilanjutkan dengan definisi ulama mengenai nikah dan lima prinsip dasar pernikahan, serta cara menerapkannya dalam kehidupan rumah tangga. Selanjutnya tentang kepemimpinan dalam rumah tangga dan pembahasan berbagai hak dan tatacara mendidik anak. Bu Musdah juga menguraikan berbagai isu aktual yang sensitif dan kontroversial bahkan dianggap tabu, seperti nikah beda agama (nikah campur), nikah bawah tanggapan (siri), poligami, hak seksual kaum gay dan lesbi, dan hak reproduksi perempuan. Pembahasan diakhiri dengan berbagai dinamika dan praktik pembaruan hukum keluarga di beberapa negara mayoritas Muslim, Tunisia, Turki, Syria, Mesir, Yordania, dan Irak. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai relevansi Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan upaya pembaruan hukum keluarga di negeri ini.

Dinamika pergulatan politik hukum Islam di Indonesia

Penelitian ini menyimpulkan bahwa substansi hukum ekstradisi memiliki persamaan antara hukum Islam dan hukum internasional. Persamaan tersebut adalah sebagai berikut; pertama, hukum Islam dan hukum Internasional sama-sama menerapkan prinsip double criminality dan tidak mengekstradisikan kejahatan politik, militer, agama, dan kejahatan yang berkaitan dengan ras, etnik, atau suku bangsa. Kedua, hukum Islam dan internasional memperbolehkan ekstradisi jika telah ada perjanjian antara kedua negara dan akan sah/resmi jika sudah ada perjanjian antara kedua negara. Ketiga, mengenai kedudukan pelaku korupsi yang diekstradisi, keduanya sama-sama menghormati dan melindungi hak asasinya sebagai manusia meskipun pelaku adalah orang yang bersalah dan menjadi tersangka. Keempat, hukum Islam dan hukum internasional juga sama-sama berkomitmen untuk menjadikan perjanjian ekstradisi sebagai sarana bagi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di dunia, karena korupsi merupakan bentuk kejahatan internasional yang disebut dalam United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003, dimana negara Islam maupun non Islam sama-sama menandatangani konvensi internasional tersebut. Persamaan substansi hukum ekstradisi ini, dikarenakan perjanjian ekstradisi merupakan hasil pemikiran atau ijtihad dari manusia yang keduanya sama-sama berorientasi mewujudkan, menjaga, dan memelihara keamanan dan ketertiban dunia. Perbedaan substansi hukum ekstradisi antara hukum Islam dan hukum internasional hanya terdapat dalam hukum prosedural mengenai peradilan in absentia bagi pelaku korupsi, karena hukum Islam tidak membenarkan pemeriksaan pengadilan atas suatu tuntutan tanpa kehadiran terdakwa. Mengenai pembagian negara menurut hukum Islam menjadi dar al-Islam dan dar al-Harb dalam proses ekstradisi pelaku tindak pidana tidak menjadi hambatan, karena negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian disebut dar al-'Ahd

yaitu suatu negara yang berhak mendapat jaminan keamanan. Hukum Islam mengenai ekstradisi dari segi filosofi lebih menekankan pada semangat terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat secara umum, sementara dalam hukum internasional ekstradisi lebih menekankan pada sisi materi hukum yang tekstual, pengaruh, ataupun dampak yang ditimbulkan juga harus berakibat dan dirasakan langsung. Penelitian ini mendukung pendapat Emilia Justyna Powell (2013), Abdullah Ahmed an-Na'im (2004), dan Mashood Baderin (2001) yang mengemukakan bahwa hukum Islam dan hukum internasional mempunyai kesamaan dan perbedaan di beberapa sisi, namun pada kondisi tertentu negara-negara yang menerapkan hukum Islam bersikap ramah terhadap hukum internasional. Relevansi antara hukum Islam dan hukum internasional juga secara praktis sudah terbukti dengan banyaknya rujukan hukum Islam dalam berbagai argumen dan laporan negara-negara Muslim ke piagam PBB dan komitekomite perjanjian hak asasi manusia. Penelitian ini menolak pendapat Ebrahim Afsah (2008), Anicee van Engelen (2006), dan Ralph H. Salmi, dan George K. Tanham (1998) yang mengatakan bahwa adanya benturan antara hukum Islam dan hukum internasional dalam bidang hukum humaniter, karena hukum Islam kurang rasa hormat terhadap hukum kemanusiaan internasional dan konstitusi hukum Islam dan hukum internasional adalah dua entitas yang berbeda.

HAM dalam dimensi/dinamika yuridis, sosial, dan politik & proses penyusunan/aplikasi HA-KHAM (hukum hak asasi manusia) dalam masyarakat

Buku yang sudah hadir di tangan para pembaca ini membahas tentang Peradilan Agama sebagai bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. Buku ini menyorot eksistensi Peradilan Agama dalam dinamika politik hukum di Indonesia dari masa ke masa. Pembahasan mengerucut pada dinamika terkini yang dihadapi Peradilan Agama, yakni berkembangnya isu-isu global, era digital dan new normal sebagai dampak merebaknya virus Covid-19 yang berdampak pada terjadinya perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat. Untuk menghadirkan konteks yang utuh, ditampilkan pula setting sistem peradilan di Indonesia secara utuh baik dari sisi sejarah, kewenangan, sumber hukum maupun sekilas tentang hukum acaranya. Buku ini terdiri dari tujuh (VII) bab yaitu: i) pendahuluan, (ii) peradilan dan penegakan hukum, (iii) peradilan dalam perspektif Islam, (iv) kekuasaan kehakiman di Indonesia, (v) perkembangan peradilan agama dari masa ke masa, (vi) peradilan agama dan tantangan era kontemporer, dan (vii) penutup. Tujuan dari pembahasan tersebut dalam rangka menelaah peluang dan tantangan pengembangan Peradilan Agama masa kini, khususnya pascareformasi sistem peradilan dan di tengah menguatnya tuntutan digitalisasi sistem peradilan dan suasana pandemi Covid-19 yang berlangsung saat ini. Semoga kehadiran buku ini membawa manfaat yang seluas-luasnya dan dapat meningkatkan wawasan pengetahuan para pembaca. Peradilan Agama Dan Dinamika Kontemporer ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Membangun Surga di Bumi

"Buku ini merupakan studi terhadap politik hukum Islam di Indonesia, dengan fokus utama pada materi-materi. Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di sini penulis menunjukkan beberapa dari peran dan kedudukan KHI di hadapan negara (Orde Baru) baik dari perspektif strategi pembentukan, materi, implementasi, dan juga fungsi hukum."

Ekstradisi Pelaku Korupsi menurut Hukum Islam dan Hukum Internasional

Secara umum, tindak pidana cyber terrorism adalah kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi. Media yang dipakai dalam kejahatan ini adalah media Internet sebagai alat untuk berkoordinasi dengan pelaku cyber lainnya dan sekaligus media untuk melakukan serangan-serangan aksi teror. Sehingga dampak yang ditimbulkan tentu saja bukan berupa kerusakan fisik seperti terorisme konvensional, tetapi bentuk kerusakannya berupa kerusakan data-data penting yang terhubung dengan Internet, pencurian informasi oleh para hacker, dan rusaknya program komputer akibat serangan virus. Hal demikian dapat dialami oleh masyarakat sipil yang memakai Internet sebagai media komunikasi, dapat juga dialami oleh kalangan bisnis asing atau lokal, dan lembaga pemerintahan. hal ini tentunya merupakan ancaman serius, sehingga diharapkan ada suatu perangkat hukum yang dapat mengatasi kejahatan cyber terrorism. Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Terorisme dan Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan prangkat hukum yang memadai saat ini untuk memberantas aksi cyber terrorism. Dalam undang-undang ini disebutkan pula unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana cyber terrorism beserta pembuktian secara elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam menangani aksi ini.

Peradilan Agama Dan Dinamika Kontemporer

Beberapa hal yang dianggap sebagai salah satu hak fundamental bagi manusia yang dari hal tersebut konsep dasar hak asasi manusia, yang sering dikenal dalam aktifitas rumpun sipil maupun politik. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah diletakkan pula berkaitan tentang landasan bagi kehidupan bangsa yang menerapkan nilai-nilai dan prinsip demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar ideologi Negara yaitu Pancasila.

Fiqh Madzhab Negara ; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia

Globalisasi hak asasi manusia (HAM) yang telah berlangsung selama beberapa decade telah menyebabkan perdebatan universalisme versus relativisme dalam hak asasi manusia (HAM) semakin tajam di berbagai negara. Rejim HAM Internasional dan para pendukung prinsip universalisme HAM berusaha untuk mengimplementasikan norma2 HAM kesesama negara, melintasi batas2 norma2 lokal seperti agama dan budaya serta kepentingan nasional suatu negara.

Cyber Terrorism dalam Tinjauan Hukum Islam

Agama mengalami dinamisasi dalam banyak hal. Sebagai sebuah ajaran yang bersifat menuntut, agama kemudian menjadi lanskap dari sebuah pemikiran hingga tindakan dari kaum agamawan dalam arti yang sebenarnya atau kaum yang teridentifikasi memiliki ikatan sosial-keagamaan dengan agama dimaksud. Menjadi tidak gampang manakala agama menimbulkan riak-riak sosial di tengah-tengah heteroginitas umat beragama dan sosial. Persoalan menjadi semakin tak sedap manakala agama kemudian menjadi semacam alat pembenar bagi tindakan-tindakan sosial, ritus hingga politik. Inilah kemudian kenapa kita selalu dihadapkan kepada ketegangan-ketegangan horisontal yang ketegangannya tak lagi terkira dimana kebenaran atas nama agama dijunjung setinggi langit oleh masing-masing pemeluk agama. Tidak hanya bangsa kita. Nyaris semua agama di semua pemeluknya di semua negara di dunia ini memiliki sejarah ketegangan antar sesama pemeluk agama. Bahkan bolehlah kita sebut misalnya Nasrani, yang mengusung jargon “tebarkan kasih untuk sesama” memiliki sejarah yang panjang atas akan aksi pemasangan atas jargon luhur ini. pun demikian misalnya Islam, Hindu, Budha dan semua aliran kepercayaan menguat dan memiliki pendukungnya yang sedikit memiliki pola yang sama dalam hal ekstrimitas dalam memaknai agama dalam berkehidupan sosial dalam sebuah lingkungan kecil hingga besar (baca: negara). Dari kenyataan ini agama menjadi momok bagi sebagian orang. Agama jugalah yang membuat orang antipati terhadap agama seperti yang kita kenal dengan sebutan kelompok atau individu dari paham yang mengadopsi ateisme. Bagaimana mestinya agama berbuat dan bersetubuh dengan mesra bersama-sama manusia? Perlukah ada kajian panjang tentang agama dan wacana keagamaan yang selama ini sudah dipandang sangat keluar dari gelanggang yang sesungguhnya sudah disediakan untuk tupoksi dari agama itu sendiri. Perlukah agama direvitalisasi dan disesuaikan dengan zaman saat ini.

DINAMIKA HUKUM PIDANA Antara Hak Kebebasan Berserikat Organisasi Kemasyarakatan Dan Tindakan Anti Pancasila

Keberadaan partai politik beserta sistemnya yang diberlakukan tentunya akan secara otomatis membawa arah suatu negara dalam mewujudkan cita-cita negara, hal itu dikarenakan pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi

hidup masyarakat, terlebih dalam suatu negara tentunya memiliki kultur politik serta sistem politik yang akan berpengaruh pada tingkat politik di pusat hingga politik di daerah dan seterusnya sampai ke tingkat politik pemerintahan yang terendah. Secara tidak langsung partai politik dapat diartikan sebagai jembatan untuk mewujudkan pembangunan dalam keberlangsungan suatu Negara. Hal ini dapat dikatakan bahwa partai politik memiliki tugas penting dalam pemerintahan, yaitu bersama masyarakat, berusaha mencapai kontrol pemerintahan, menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan mereka atau kelompok pendukungnya serta mengorganisasi dan membujuk pemilih untuk memilih calon mereka agar menempati jabatan tertentu.

Hak Asasi Manusia; Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia

Kajian yang dihadirkan dalam buku ini mencoba melihat politik Islam dengan cara yang empiris tersebut.

Jurnal dinamika hak asasi manusia

“PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MANDIRI: PEMBATAAN NAIK KELAS RAWAT INAP”. Ketentuan tentang peningkatan kelas rawat inap pasca Permenkes Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam program Jaminan Kesehatan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi peserta jaminan kesehatan nasional mandiri pasca terbitnya Permenkes Pengenaan Urun biaya dan Selisih dalam Program Jaminan Kesehatan, dan untuk menganalisis adanya konflik norma antara Permenkes Pengenaan Urun biaya dan Selisih biaya terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan per-undang-undangan, konseptual dan komparasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum peserta JKN mandiri pasca berlakunya Permenkes Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan adalah tidak jelas, menimbulkan ketidak-pastian hukum. Bahwa telah terjadi konflik norma antar Permenkes Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Jaminan Kesehatan dengan Perpres Jaminan Kesehatan, Undang-Undang SJSN, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan HAM. Penyelesaian yang dapat ditempuh untuk disharmoni atau konflik norma tersebut adalah dengan mencabut pasal 10 ayat (5) Permenkes tersebut, mengenyampingkan pasal tersebut, dan melakukan uji materi ke Mahkamah Agung.

Dinamika Wacana Islam

Keberadaan partai politik di Indonesia tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia. Pertumbuhan partai politik tersebut ditandai secara samar-samar oleh berdirinya organisasi-organisasi kemasyarakatan pada masa sebelum Indonesia merdeka. Hal tersebut dapat diamati dari berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, Syarikat Islam pada tahun 1912, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang menyusul kemudian. Namun buku ini tidak akan terlalu jauh membahas sejarah dan dinamika partai politik pra kemerdekaan serta awal kemerdekaan. Fokus buku ini lebih kepada dinamika partai politik berbasis agama pada konteks politik Orde Baru. Kehadiran buku ini, penulis berharap buku ini dapat menambah gagasan dalam diskusi yang berkelanjutan tentang tema agama dan politik di Indonesia. Dalam perkembangannya ternyata partai politik yang berbasis agama semakin banyak dalam kancah perpolitikan Indonesia. Pertanyaannya selalu sama, apakah Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia masih memiliki kekuatan ketiga berhadapan dengan partai-partai politik yang berbasis keagamaan? Bagaimana konteks politiknya ketika keduanya berhadapan secara ideologis? Mudah-mudahan buku ini sedikit memberikan gambaran dalam konteks tersebut.

Dinamika Partai Politik Indonesia: Problematika Penarikan Dukungan Calon Kepala Daerah

Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebuah diskursus yang tidak pernah selesai, selalu saja menarik untuk dikaji dan ditelaah. Sebagai warga negara sudah sepatutnya memahami prinsip tentang hak asasi manusia,

bahwa ketika kita menyadari memiliki hak yang harus dihormati oleh orang lain, maka pada saat itu pula kita menyatakan diri untuk menghargai serta menghormati hak asasi orang lain. Pun demikian halnya apabila dikaitkan dengan pengaturan tentang kewajiban asasi manusia dalam konstitusi Indonesia bahwa di dalamnya dapat kita temukan penegasan terhadap pengakuan akan kewajiban kita untuk menghormati Hak Asasi Manusia. Pada prinsipnya kewajiban itu melekat pada diri kita sebagaimana hak melekat pada diri kita sebagai manusia, jika mendikotomikan antara hak dan kewajiban maka akan terjadi sebuah kesenjangan pemahaman tentang prinsip hidup bertoleransi. Sejatinya semangat yang dibawa oleh pengaturan hukum terkait hak asasi manusia adalah guna menjaga serta menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Guna menegakkan dan melindungi hak asasi manusia maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga kewajiban sebagai manusia adalah untuk menyadari bahwa hak yang melekat kepada diri kita bukanlah hak yang bebas nilai atau dengan kata lain kebebasan sebebaskan-bebasnya namun adalah hak yang dapat dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati dan menghargai hak orang lain serta melaksanakan aturan hukum yang berlaku. Maka nyatalah bahwa perlindungan dan penegakan hak asasi manusia akan sangat bergantung kepada konstruksi politik hukum nasional suatu negara.

Menilik Politik Islam Dari Hilir Mahakam: Persepsi Masyarakat Muslim Samarinda terhadap Negeri Muslim dan Penerapan Regulasi Syariah

Banyak cara memajukan ilmu hukum, salah satunya yaitu dengan cara menulis buku *Dinamika Hukum Dalam Pembangunan Berkelanjutan* ini. Tulisan-tulisan para pakar yang merupakan teman sejawat dan seprofesi yubiliaris di dunia pendidikan dan pengajaran, serta para anak didiknya dalam kurun waktu lima dekade selama mengajar di UNPAD dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Dipersembahkan dengan segala ketulusan hati kepada: Prof. Em. Dr. Eddy Damian S.H dan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung yang merayakan Dies Natalisnya yang ke-60. Artikel-artikel ilmiah yang secara inspiratif dimuat dalam buku ini sangat membantu dan bernilai guna untuk memahami hal-hal mendasar berkenaan ciri-ciri atau konsep yang menjadi pokok pembahasan tertentu tentang kedinamikaan hukum di Indonesia, dalam pembangunan yang berkelanjutan.

PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MANDIRI

Di tengah masih menguatnya isu-isu Hukum Hak Asasi Manusia baik level internasional maupun di Indonesia, buku ini dihadirkan sebagai salah satu sumber literatur yang membahas Hukum Hak Asasi Manusia dalam dua dimensi sekaligus, dimulai dari dimensi Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, lalu mengupas secara mendalam Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Harapannya, para mahasiswa hukum, praktisi hukum, kelompok masyarakat bisa memahami bagaimana relasi antara Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dengan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pemahaman komprehensif atas keduanya sangat penting sebagai sebuah bahan renungan tentang aspek-aspek kelemahan atau kelebihan dari Hukum Hak Asasi Manusia yang saat ini berkembang dan terus dikembangkan di Indonesia. Dengan menyajikan aspek filosofis, sejarah, dan hukumnya secara runtut dan sistematis, baik meliputi kajian tentang instrumen-instrumen hukumnya, maupun mekanisme penegakannya. Lebih jauh lagi, Penulis menyadari bahwa karakter khusus dari hukum hak asasi manusia membuat Hukum HAM baik secara teori, konseptual, maupun praktis memiliki kompleksitas tersendiri. Kompleksitas ini yang membuat Hukum Hak Asasi Manusia sering kali dipahami secara keliru, dirancukan dengan cabang ilmu hukum lainnya. Oleh karena itu, Penulis juga memperkaya pengayaan dalam buku ini dengan memaparkan berbagai studi kasus baik yang berkaitan dengan hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak kelompok rentan lainnya. Studi berbagai kasus berdimensi hak asasi manusia yang dihadirkan dalam buku ini yang akan menjadi kekuatan dari buku ini dibandingkan literatur-literatur yang serupa lainnya. Harapannya para pengguna dari buku ini tidak hanya sebatas memahami Hukum Hak Asasi manusia dari sisi *das sein*, namun juga mengerti berbagai kerumitan, problematik, maupun perkembangan penegakan Hukum Hak Asasi Manusia dari aspek *das sollen*

nya.

Dinamika Ideologi Partai Politik Keagamaan Pada Masa Orde Baru

Buku ini adalah serangkaian narasi yang memberdahkan eksistensi, relevansi dan tantangan hukum Islam pasca reformasi di berbagai bidang : agraria, mata uang kripto, perkawinan beda agama, perbankan, privatisasi BUMN dan lain lain. Ditulis oleh para akademisi dan aktivis yang kompeten di bidangnya dan disajikan dengan tutur bahasa yang mudah dipahami. Buku ini patut dibaca oleh siapapun yang ingin memahami perkembangan hukum Islam pasca reformasi, baik terkait dengan perkembangan legislasi pasca reformasi maupun perkembangan ekonomi politik dunia abad 21.

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: PERKEMBANGAN DAN PERDEBATAN MASA KINI

Penerbit : Airlangga University Press ISBN: 9786026606976 Buku ini mengetengahkan pandangan tentang pluralisme HAM yang berada di antara aspek religius dan sekuler. Dualisme pemahaman inilah yang menjadi pembahasan utama, yang pada akhirnya akan memberikan bentuk harmonisasi prinsip-prinsip HAM dalam Islam dan sekuler tanpa mengurangi inti sari dari kedua bentuk tersebut. Namun dalam penjabaran dan pemaknaan dari buku ini, Penulis akan bertitik tolak dari perspektif hukum Islam karena yang menjadi ruh dalam buku ini adalah mencari dasar terhadap pembenaran bahwa Islam telah mengatur HAM dan prinsip HAM yang ada telah sesuai dengan prinsip hukum Islam, terlepas dari pembahasan tentang fenomena lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) yang saat ini sedang populer.

Dinamika Hukum Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Kehadiran buku ini dianggap penting, mengingat Aceh dengan kewenangan yang luas melaksanakan syariat Islam memerlukan informasi dan pengetahuan yang mendalam, terutama mengenai dinamika, pergumulan pemikiran dan penafsiran terhadap hukum syariah Islam itu sendiri. Materi yang terkandung dalam buku ini menerangkan tentang paradigma baru seputar hukum syariat yang mendapat perhatian publik. Oleh karena itu, buku ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pandangan yang agak komprehensif dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Mudahmudahan bermanfaat bagi para akademisi, praktisi dan masyarakat yang menaruh perhatian terhadap penerapan hukum syariah di Aceh.

Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus

Understanding Islam through interpretation and implementation of Koran and Hadith in Indonesia; collection of articles.

PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM: Eksistensi, Relevansi, dan Tantangannya di Indonesia Pasca Reformasi

Issues on social problems, human rights, women, and democracy from Islamic perspectives.

Syariah: Pengakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Perspektif Hukum Islam

Dewasa ini, wajah pemikiran Islam global lebih banyak yang bersifat rigid, radikal, dan fundamentalistik. Bahkan, banyak dijumpai tindakan kriminal atau aksi terorisme yang diklaim oleh beberapa pelakunya atas nama \"hukum Islam\". Padahal, basis fundamental setiap hukum Islam adalah prinsip kebijaksanaan dan keselamatan umat manusia. Mirisnya lagi, aksi terorisme tersebut justru dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang sedang menikmati kedamaian, ketenteraman, dan kemakmuran hidup. Salah satu problem

fundamentalnya ialah wacana hukum Islam masih bercorak atomistik-parsialistik, baik dalam tataran metodologis maupun praktis. Aplikasi hukum Islam lebih bersifat reduksionis daripada holistik, literal daripada moral, satu dimensi daripada multidimensi, bercorak oposisi biner ketimbang multinilai, dekonstruksionis ketimbang rekonstruksionis, dan bersifat kausal ketimbang teleologis. Oleh karenanya, diperlukan pendekatan sistem yang bercorak multidisipliner terhadap teori-teori maqashid asy-syari'ah secara metodologis. Buku ini mengulas pendekatan sistem tersebut, yang diusung oleh Jasser Auda. Ia melakukan rekonstruksi paradigmatis baru dalam menganalisis hukum Islam. Berpijak pada sejumlah fitur sistem dalam membangun world view keislaman di era kontemporer. Maqosid yang dulutitiktekannya hanya pada pentingnya perlindungan terhadap umat Islam, bergeser menjadi perlindungan terhadap kemanusiaan-universal. Selamat membaca!

PARADIGMA BARU HUKUM SYARIAH DI ACEH

Keadilan menjadi tujuan akhir dari sebuah sistem hukum. Untuk itu Indonesia memerlukan sistem peradilan yang mampu mewujudkan suatu putusan yang adil dan menjamin adanya perasaan damai bagi masyarakat pencari keadilan. Masyarakat Indonesia membutuhkan suatu sistem peradilan yang tak hanya berorientasi pada prosedural regulasi semata, namun juga peradilan yang berdasarkan sanubari melalui pejabat penegak hukum yang bergerak berdasarkan hati nuraninya guna menegakkan keadilan bagi masyarakat. Melalui buku ini penulis akan membahasnya dalam suatu kajian historis, sosiologis, filosofis, serta relevansinya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinamika baru wacana Islam di Indonesia

Mata kuliah Hak Asasi Manusia merupakan mata kuliah wajib di perguruan tinggi, terutama di fakultas hukum di universitas mana pun. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa disadarkan bahwa semua manusia sejak dalam kandungan sudah mempunyai sejumlah hak yang dikaruniai Tuhan yang Maha Esa tanpa pandang bulu. Tanpa hak hak tersebut, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Eksistensi hak hak itu bukan karena direayasa manusia, bukan pula karena ditetapkan penguasa, atau ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan mana pun. Hak-hak itu pada hakikatnya melekat (inherent) dengan keberadaan manusia sejak manusia diciptakan, bukan sejak lahir. Hak-hak itu melekat pada semua orang (at all persons) sepanjang hayat (at all times) dan di setiap tempat (at all places), bersifat kodrati dan universal. Sebagai bahan pendidikan di perguruan tinggi, materi hak asasi manusia tersebar di banyak literatur, baik yang berbahasa asing maupun berbahasa Indonesia. Semua literatur tersebut ditulis menurut perspektif penulisnya masing-masing, sehingga ditemui pada bagian yang satu diuraikan secara panjang lebar, sedangkan pada bagian lain disentuh kulit kulitnya saja, bahkan ada bagian tertentu yang tidak disentuh sama sekali. Dengan kata lain, kedalaman analisis dalam buku yang satu berbeda dengan buku yang lain. Oleh karena itu, sebagai bahan pendidikan di perguruan tinggi, mahasiswa tidak cukup hanya membaca beberapa judul buku tentang hak asasi manusia. Semakin banyak literatur yang dibaca, semakin dalam pemahaman dan pengenalan tentang hak asasi manusia. Kendatipun demikian, agaknya tidak mudah mewajibkan mahasiswa membawa semua literatur itu ke ruang kelas untuk mengikuti mata kuliah ini. Dengan tersedianya buku ini, selain untuk membantu mahasiswa agar dapat mengikuti mata kuliah ini dengan baik, juga menjadi pegangan bagi dosen untuk menerapkan metode belajar-mengajar berbasis kompetensi.

Fikih jalan tengah

Untuk kepentingan pengembangan perangkat pembelajaran MKI di Universitas Ahmad Dahlan, LPP telah menyusun program bahwa setiap MKI memiliki buku ajar yang ditulis para dosen pengampunya. Buku ajar yang ditulis dosen Universitas Ahmad Dahlan memiliki keuntungan, karena ditulis berdasarkan pengalaman pembelajaran yang telah dilaksanakan, sekaligus menjawab kebutuhan di masa yang akan datang, yang didasarkan pada lingkungan terdekat mahasiswanya. Buku Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang hadir di hadapan pembaca ini, memiliki nilai penting bagi pemenuhan sumber belajar mahasiswa, sekaligus sebagai upaya mengokohkan nation and character building mahasiswa.

Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan sebuah karya yang membahas tema-tema kontemporer terkait dengan syariat Islam secara komprehensif, beberapa tema yang disesuaikan dengan perkembangan isu-isu terkini. Buku ini disusun secara sistematis sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi civitas akademika dan masyarakat umum untuk mengembangkan pengetahuan, selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran pada berbagai mata kuliah yang ada di perguruan tinggi dalam bidang studi Islam.

Sistem Peradilan Di Indonesia Antara Sanubari Dan Regulasi (Suatu Kajian Historis, Sosiologis, & Filosofis) - Damera Press

Judul : Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis Penulis : 1. Sumarta, S.Pd.I, M.Si 2. Dr. Sarwo Edy, MM, Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 229 Halaman No ISBN : 978-623-497-052-4 Tahun Terbit : Oktober 2022 Sinopsis Sosiologi hukum Islam adalah satu cabang dari sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum Islam. Pemikiran sosiologi hukum Islam lebih berfokus pada aplikasi empiris atau faktual dari hukum. Sosiologi hukum Islam berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Oleh karena itu, selain perlu memahami hukum itu sendiri, semua pihak yang mempelajari sosiologi dan ilmu hukum idealnya memahami juga konteks sosiologis dari teori dan penerapan hukum dalam situasi riil. Buku ini dapat dijadikan sebagai bahan buku ajar perkuliahan untuk matakuliah Sosiologi Hukum Islam yang membahas bagaimana eksistensi hukum Islam ditengah pergulatannya ditengah-tengah masyarakat modern yang harus kita sadari tidak semua masyarakat telah mengenyam pendidikan di pesantren dan mengenal Islam dari mengaji dan mempelajarinya dari para kiai ataupun para ustadz atau guru ngaji yang berada sekitar tempat tinggal mereka. Semoga.

Hak Asasi Manusia

Buku ini menghimpun berbagai refleksi atas dinamika kehidupan yang sangat beragam dan bervariasi sesuai isu-isu yang mencuat ke permukaan dan perlu mendapat sorotan, tanggapan, dan ulasan. Isu-isu aktual tentang Islam, Pancasila, NKRI, praktik syariah hingga diskursus demokrasi menghiasi bagian-bagian buku ini. Tak bisa dimungkiri bahwa topik tersebut kini masih sangat hangat didiskusikan dan menantang untuk dikaji secara lebih mendalam. Demikian juga isu-isu aktual lainnya yang dihadirkan penulis untuk pembaca, seperti tentang sains dan teknologi, peradaban Islam, pendidikan Islam, hingga isu-isu mengenai humanisme, rasisme, radikalisme, dan seabrek topik penting lainnya menjadi menu yang menarik dan tentu saja semakin melengkapi topik kajian di era milenial ini. Selamat membaca!

Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

"Ketika berbicara tentang negara ideal, Al-Farabi menyatakan bahwa persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh seorang penguasa, selain kemampuan berjihad, ialah kemampuan untuk melakukan jihad. Kedua kemampuan ini dapat menentukan substansi negara dan penguasanya." —Prof. Dr. Azyumardi Azra, Guru Besar Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di antara wacana menarik dan kerap kali diperbincangkan dalam kehidupan sosial-politik ialah adanya keinginan mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang beradab. Sebuah tatanan masyarakat yang egaliter dan berkeadilan. Keinginan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang ideal ini muncul seiring kesadaran manusia untuk hidup berkelompok, sehingga tercipta menjadi negara. Al-Farabi hadir sebagai salah satu yang tidak boleh dilewatkan dalam wacana pembangunan negara yang ideal. Bertolak dari kehidupan ideal di Madinah pada masa Rasulullah Saw., Al-Farabi mengusulkan al-Madinah al-Fadhilah dalam menyunggi kehendak dan cita-cita bersama. Baginya, negara yang baik ialah negara yang dipimpin oleh seorang bijaksana yang terlepas dari ketergantungan pada dunia. Lantas, bagaimanakah penjelasan utuh al-Madinah al-Fadhilah yang

dimaksud Al-Farabi? Bisakah bangsa Indonesia merefleksikan semangat alMadinah al-Fadhilah dalam konteks kekinian? Temukan jawabannya dalam buku ini.

SYARIAT ISLAM Antara Utopisme & Tuntutan Modernitas

Penelitian ini mengungkap adanya perkembangan dan kemajuan pendidikan Islam yang signifikan di suatu daerah yang notabene mayoritas Kristiani. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas tentang dinamika pendidikan Islam minoritas di Nusa Tenggara Timur yang fokus pada analisis eksistensi, kontestasi dan konvergensi pada pergerakan Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK) yang telah berdiri sejak tahun 1987. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi pendidikan, penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK) sebagai minoritas telah mampu mempertahankan eksistensi, berkontestasi, dan mencari titik konvergensi dengan penduduk mayoritas yang notabene Kristiani di Nusa Tenggara Timur. Hal itu disebabkan karena ia memiliki sikap terbuka dalam mendefinisikan pemikiran yang inklusif, toleran, dan fairness dalam konteks kehidupan sosial yang plural. Realitas empirik itu selaras dengan pendapat Gry Hvass Pedersen (2016) dan Brooks (2018) bahwa komunitas muslim sangat mampu mempertahankan eksistensi bahkan lebih dari itu sebagai kaum minoritas bila memiliki sifat terbuka dan mampu mendefinisikan ideologinya, mengekspresikan agama secara adaptif, selektif menggunakan simbol identitas, dan terpenting adalah bisa menyajikan kebutuhan masyarakat. Secara otomatis temuan ini membantah pendapat Kinloch (1979) yang menurunkan optimisme kelompok dengan mendefinisikan kaum minoritas sebagai kaum lebih rendah yang sudah pasti memiliki cacat secara fisik maupun mental sehingga dengan mudah tereksplorasi dan didiskriminasi, yang pada akhirnya tidak dapat bertahan apalagi memiliki kekuasaan.

Sosiologi Hukum Islam

Dinamika Islam Milenial

[previous power machines n6 question and answers](#)

[gold preliminary coursebook](#)

[2006 yamaha 90 hp outboard service repair manual](#)

[accounting study guide chap 9 answers](#)

[the global debate over constitutional property lessons for american takings jurisprudence](#)

[lotus birth leaving the umbilical cord intact](#)

[romans questions and answers](#)

[ford escort 95 repair manual](#)

[ap biology chapter 17 from gene to protein answers](#)

[mf 165 manual](#)